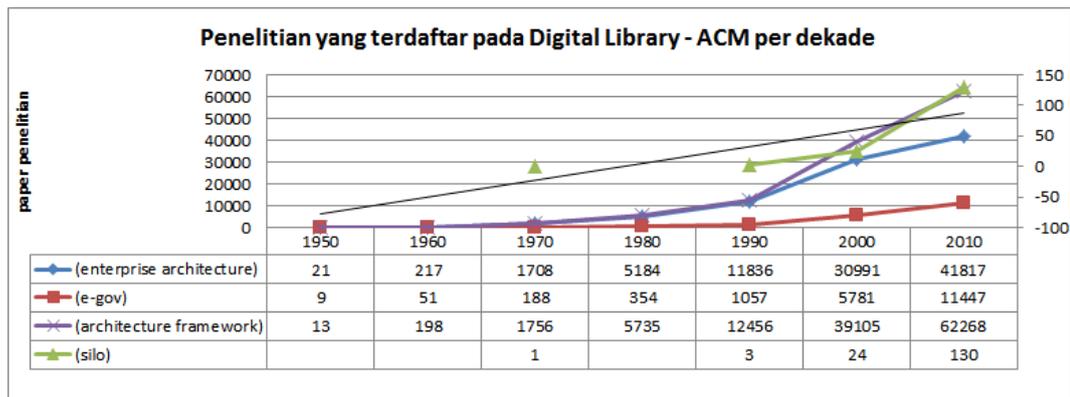


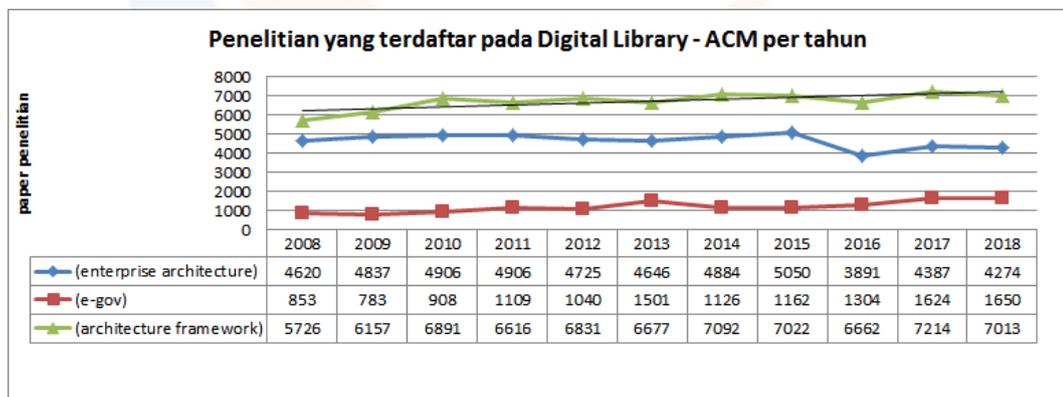
BAB I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

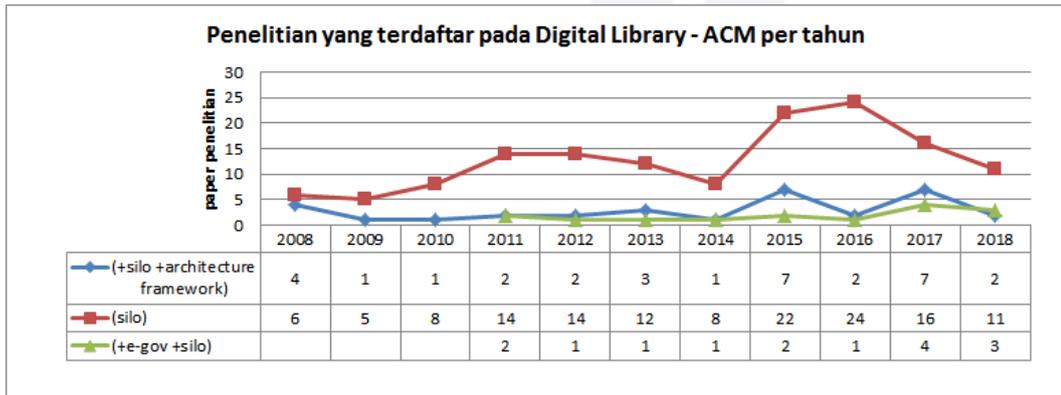
Pengertian *enterprise architecture*, *e-gov*, dan *architecture framework* dikenal sudah cukup lama sejak dekade 50-an. Diskusi dan penelitian tentang ini banyak dilakukan oleh para peneliti di dunia. Bersumber pada situs Digital Library – ACM [1] dapat diperoleh perkembangan yang berhasil dihimpun oleh organisasi ini.



Gambar 1. Penelitian terkait enterprise arsitektur pada dekade 1950 hingga 2010.



Penelitian terkait enterprise arsitektur pada periode 2008 hingga 2018.



Penelitian terkait silo pada periode 2008 hingga 2018.

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa sejak dekade 50-an hingga dekade Gambar 3.

terakhir penelitian terhadap ketiga pengertian di atas secara signifikan semakin banyak dilakukan para peneliti di dunia. Silo (dari bahasa Yunani σιρός - siros, "lubang untuk menampung biji-bijian") adalah struktur bangunan untuk menyimpan bahan curah. Dalam dunia teknologi informasi, yang dimaksud dengan silo adalah: sistem manajemen yang terisolasi di mana satu sistem informasi atau subsistem tidak mampu beroperasi secara timbal balik dengan yang lain yang, atau seharusnya, terkait. Pada Gambar 1.1. dapat dilihat bahwa penelitian terkait "Silo" pernah dilakukan pada tahun '70-an dan mulai tahun '90-an semakin banyak yang membahasnya.

Gambar 1.2. menunjukkan bahwa penelitian terkait "enterprise architecture", "e-gov" dan "architecture framework", tetap banyak dilakukan di dunia. Sedangkan pada Gambar 1.3. terlihat penelitian mengenai "Silo" meningkat pada 3 tahun terakhir. Pada penelitian ini akan dilakukan investigasi mengenai "Silo" yang terjadi pada penerapan "enterprise architecture" dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

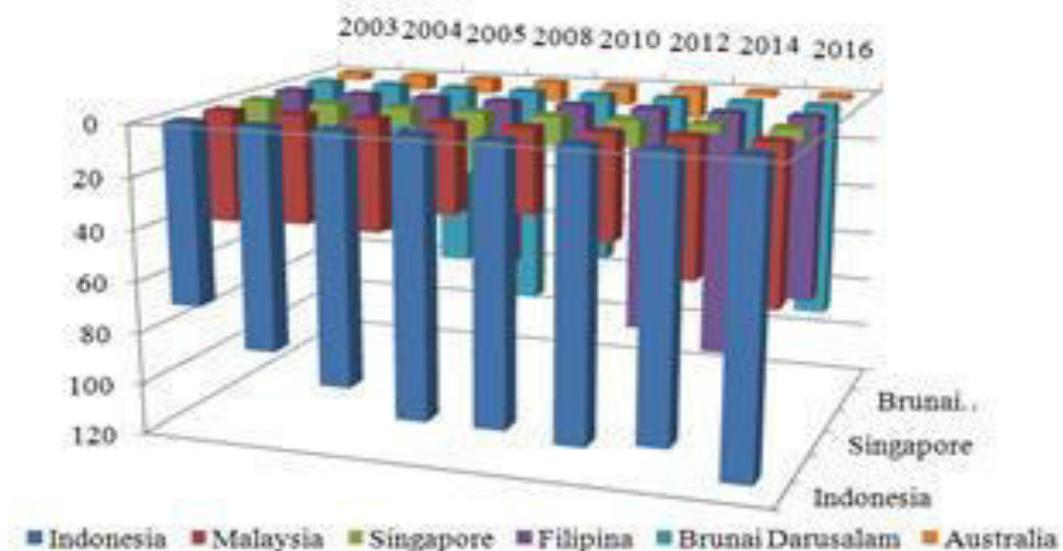
I.2 Permasalahan

I.2.1 Identifikasi Masalah

Penerapan teknologi informasi di Indonesia terutama "enterprise architecture" sudah sejak lama dilakukan. Beberapa peraturan dan perundang-undangan telah diterbitkan untuk mengatur penerapan teknologi informasi ini di lingkungan pemerintahan, di mana lebih dikenal dengan sebutan "electronic

government (e-gov)”. Beberapa instansi telah menerapkannya dengan baik dalam lingkungan organisasi instansi tersebut. Namun masih terjadi jentang yang cukup jauh dalam tingkat kematangan penerapan “*enterprise architecture*” pada organisasi pemerintah yang ada di seluruh Indonesia.

Bagaimana penerapan “*enterprise architecture*” atau e-gov ini di Indonesia? Berdasarkan survey [2] yang dilakukan oleh PBB sejak tahun 2003 hingga tahun 2016, didapat hasil seperti yang terlihat pada grafik berikut.



Gambar 4.

Posisi Indonesia dalam penerapan e-gov terhadap negara sekitar menurut survey yang dilakukan PBB.

Indonesia selalu berada pada posisi yang terbawah di antara negara-negara sekitarnya dalam penerapan e-gov. Apa yang dijadikan oleh PBB dalam penilaian tersebut? Adakah sebab lain yang menyebabkan hasil penilaian tersebut seperti itu? Ataukah kita memang kurang berhasil dalam menerapkan e-gov pada sistem pemerintahan kita? Untuk ini perlu dilakukan pengkajian mendalam terhadap kondisi di Indonesia.

Beberapa instansi pemerintah sudah memiliki kematangan yang cukup dalam mengimplementasikan “*enterprise architecture*” ini untuk organisasinya, namun pengintegrasian data dan informasi antar lembaga/organisasi belum dapat dilakukan sepenuhnya guna mengalang efektivitas dan efisiensi sehari-hari. Interoperabilitas dari setiap sistem “*enterprise architecture*” setiap lembaga, masih sangat minim. Seperti terlihat dalam penerapan e-KTP nasional yang

diharapkan dapat dilakukan secara menyeluruh di negara ini, ternyata belum dapat dilakukan sepenuhnya. Menghadapi situasi ini, perlu dilakukan pengkajian mengenai hal-hal yang menyebabkan ketidak berhasilan penerapan teknologi ini. Dalam penelitian-penelitian yang dilakukan di dunia, salah satu penyebab ketidak berhasilan sebuah sistem “*enterprise architecture*” adalah “*silo mentality*” yang menimbulkan sebuah “*silo*”.

I.2.2 Batasan Permasalahan

Dengan keterbatasan waktu dan kesempatan yang ada, penelitian ini dibatasi dengan cakupan sebagai berikut:

Kajian penerapan “*enterprise architecture*” yang dilakukan hanya sebatas organisasi/lembaga pemerintahan di Indonesia yang memberikan kesempatan untuk menunjang penelitian ini.

Kajian mengenai pengaruh dan kondisi “*silo*” dalam penerapan “*enterprise architecture*” di Indonesia.

Kajian peraturan dan perundang-undangan yang ada di lingkungan pemerintah Indonesia terkait dengan penerapan “*enterprise architecture*” pada pemerintahan. Rekomendasi langkah-langkah terhadap untuk pengaruh “*silo*” di Indonesia agar tidak mengurangi efektifitas penerapan “*enterprise architecture*” pada kinerja pemerintahan.

Dengan batasan-batasan di atas, maka disusunlah “*Research Question (RQ)*” untuk penelitian ini, sebagai berikut:

“Bagaimana kondisi Silo dalam pemerintahan Republik Indonesia?”

Dengan menjawab RQ di atas, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan:

- a. Kondisi silo sistem di Indonesia.

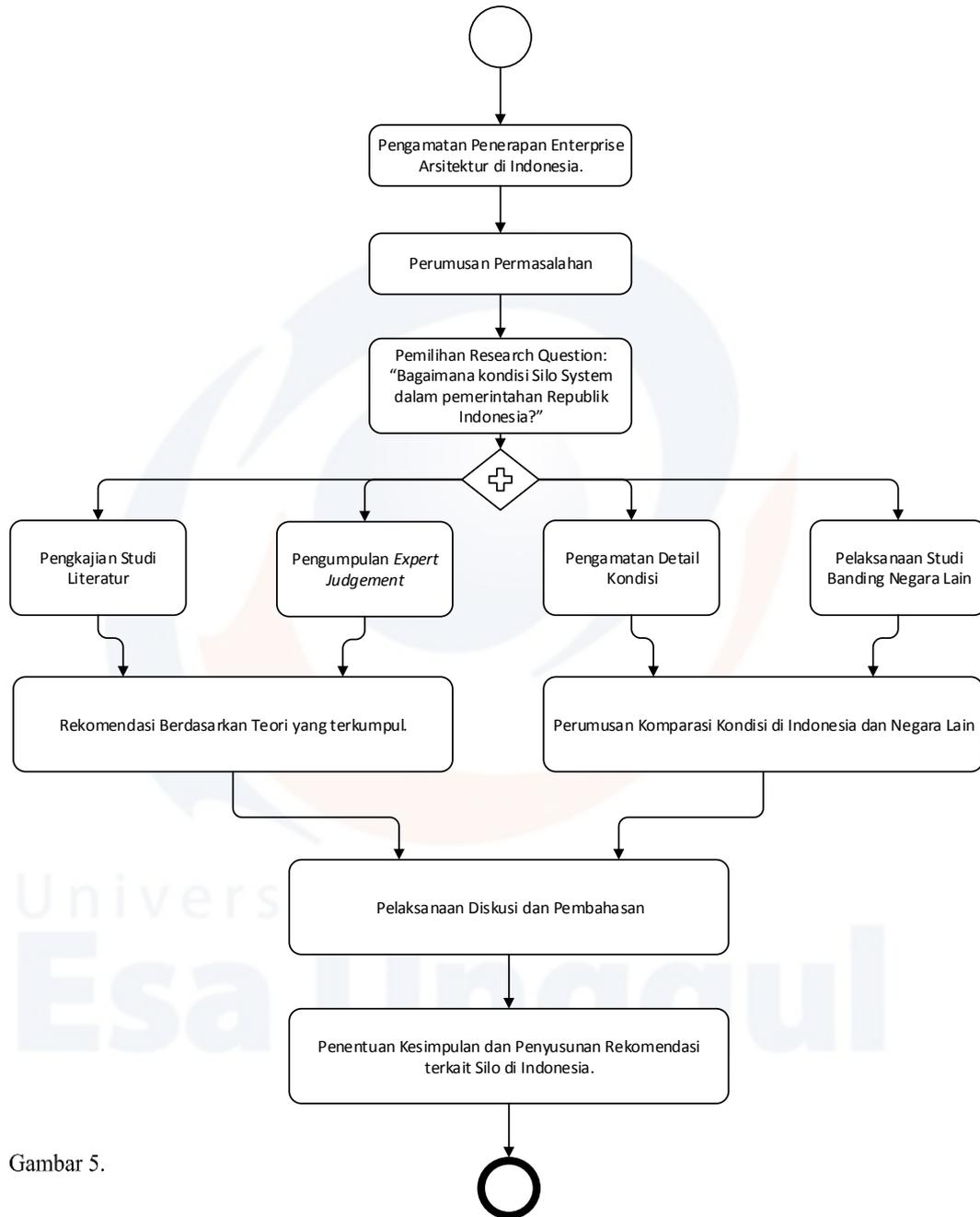
Gambaran penerapan “*enterprise architecture*” dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Peraturan dan perundang-undangan yang ada terkait penerapan “*enterprise architecture*” atau e-gov secara Nasional.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan “*enterprise architecture*” atau e-gov agar dapat terciptanya sebuah sistem yang lebih efisien dan efektif.

I.3 Metoda Penelitian

I.3.1 Konseptual Desain Penelitian



Gambar 5.

Konsep Penelitian yang akan dilakukan.

I.3.2 1.3.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada periode bulan Juni 2018 hingga bulan Desember 2020, yaitu pada periode penyusunan Peraturan Presiden 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik [3] dan periode penyusunan Referensi Arsitektur SPBE Nasional. Dengan lokasi utama di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Universitas Esa Unggul, serta pada acara di tempat lain yang diselenggarakan oleh institusi tersebut.

I.3.3 1.3.3. Jadwal Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan mengikuti jadwal seperti berikut ini:

No	Uraian	2018 (Triwulan)		2019 (Triwulan)			
		III	IV	I	II	III	IV
1	Perumusan Masalah						
2	Studi Literatur						
3	Expert Judgement						
4	Pengamatan						
5	Studi Banding						
6	Rekomendasi Teori						
7	Komparasi						
8	Pembahasan						
9	Rekomendasi						
10	Penyusunan Laporan						

Tabel 1. *Timeline* Pelaksanaan Penelitian

I.3.4 1.3.4. Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan gambaran dan penjelasan yang jelas, Tesis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan
Berisi tentang latar belakang permasalahan, pendefinisian permasalahan, tujuan penelitian, serta metodologi yang dipergunakan.
- b. Bab II Kajian Teori dan Literatur
Berisi hasil-hasil studi literature terkait.
- c. Bab III Pengamatan Kondisi Indonesia dan negara Lain
Berisi hasil-hasil pengamatan terhadap penerapan teori penunjang penelitian ini di Indonesia dan beberapa negara lain.

- d. Bab IV Pembahasan
Berisi hal-hal yang menjadi pembahasan dan diskusi yang terjadi dalam penelitian ini.
- e. Bab V Hasil dan Rekomendasi
Berisi rangkuman hasil-hasil pembahasan serta rekomendasi terkait penelitian.
- f. Bab VI Kesimpulan
Berisi kesimpulan penelitian dan saran.
- g. Daftar Pustaka
Daftar literatur yang dipergunakan untuk menunjang penelitian ini.

I.4 Tujuan Penelitian

Dengan mengetahui hal-hal yang dapat menyebabkan ketidak-berhasilan dari penerapan “*enterprise architecture*” atau e-gov, diharapkan penerapan ini dapat dilakukan dengan baik di Indonesia hingga terciptanya sistem pemerintahan elektronik yang efisien dan efektif.

I.5 Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini akan berkontribusi dalam:

- a. Pemetaan kondisi penerapan “*enterprise architecture*” sebagai sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia.
- b. Indikasi penyebab yang kurang-berhasilnya penerapan “*enterprise architecture*” di Indonesia.
- c. Rekomendasi pemecahan yang tepat dalam penerapan “*enterprise architecture*” di Indonesia.
- d. Rekomendasi acuan dalam penerapan “*enterprise architecture*” pada sebuah pemerintahan negara.



Universitas
Esa Unggul